2023

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan / kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Disamping itu, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan Renstra SKPD 2022 - 2026 dan sebagai pijakan/langkah untuk pelaksanaan kinerja yang akan datang. Segala keberhasilan pembangunan pada pelaksanaan Renstra yang lalu di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tidak terlepas dari perhatian, bantuan dan kerja keras semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Kami berharap bahwa segala program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa apa yang di sajikan masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini.

Banjarbaru, Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **6**
BAB I PENDAHULUAN **10**
1.1. Latar Belakang 10
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi 11
1.3. Struktur Organisasi 13
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi 14
1.5. Sistematika Penyajian 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama 16
2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **73**
3.1. Capaian Kinerja Eselon II 73
3.2. Capaian Kinerja Eselon III 117
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air 117
2. Kepala Bidang Bina Marga 119
3. Kepala Bidang Cipta Karya 121
4 . Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi 127
5 . Kepala Bidang Tata Ruang 128
3.3. Capaian Kinerja Eselon IV (Sub. Koordinator) 129
1. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk 129
2. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa 131
3. Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan 132
4. Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 134
5. Sub. Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan 135
6. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung 138
7. Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi 140
8. Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu 141
9. Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang 142
10. Sub. Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang 143

BAB IV PENUTUP 145
4.1. Simpulan 145
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja 146
LAMPIRAN 148
1. SOP Pengumpulan data kinerja 148
2. SK Pengelola SAKIP 149
3. Foto Visual Kegiatan 154

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 68
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 74
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 75
Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air 76
Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir Tahun 2022 77
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir 77
Tabel 3.6 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir 78
Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir 79
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2022..... 80
Tabel 3.9 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi 81
Tabel 3.10 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi 81
Tabel 3.11 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi..... 83
Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 83
Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 84
Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 85
Tabel 3.15 Perbandingan RPJMD dan Nasional Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 85

Tabel 3.16 Realisasi Keuangan Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 87
Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 3 88
Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 89
Tabel 3.19 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 89
Tabel 3.20 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 90
Tabel 3.21 Realisasi Keuangan Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 91
Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 4 91
Tabel 3.23 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 4 92
Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 4 93
Tabel 3.25 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 4 93
Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Sasaran 4 95
Tabel 3. 27 Analisis Pencapaian Sasaran 5 95
Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 5 96
Tabel 3.29 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 5 96
Tabel 3.30 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 5 97
Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Sasaran 5 98
Tabel 3.32 Analisis Pencapaian Sasaran 6 98
Tabel 3.33 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 6 99
Tabel 3.34 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 6 100
Tabel 3.35 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 6 100
Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Sasaran 6 101
Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 7 102
Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 7 103
Tabel 3.39 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 7 103
Tabel 3.40 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 7 103
Tabel 3.41 Realisasi Keuangan Sasaran 7 105
Tabel 3.42 Analisis Pencapaian Sasaran 8 105
Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 8 106
Tabel 3.44 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 8 106

Tabel 3.45 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8 106
Tabel 3.46 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8 108
Tabel 3. 47 Analisis Pencapaian Sasaran 9 108
Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 9 109
Tabel 3.49 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 9 110
Tabel 3.50 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 9 110
Tabel 3.51 Realisasi Keuangan Sasaran 9 112
Tabel 3.52 Analisis Pencapaian Sasaran 10 112
Tabel 3.53 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 10 113
Tabel 3.54 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 10 113
Tabel 3.55 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 10 114
Tabel 3.56 Realisasi Keuangan Sasaran 10 115
Tabel 3.57 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Sumber Daya Air 117
Tabel 3.58 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Bina Marga 119
Tabel 3.59 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Cipta Karya 121
Tabel 3.60 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi 127
Tabel 3.61 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Tata Ruang 128
Tabel 3.62 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk 130
Tabel 3.63 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa 131
Tabel 3.64 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan 132
Tabel 3.65 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 134
Tabel 3.66 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan 135
Tabel 3.67 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung 138
Tabel 3.68 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi 140
Tabel 3.69 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu 141

Tabel 3.70 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang..... 142
Tabel 3.71 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang..... 143

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tanggal 26 Desember 2021 terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan
    3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :
    1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
    2. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
d. Bidang Bina Marga terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :
    1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
    2. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
e. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :
    1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
    2. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
f. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :
    1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
    2. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :
    1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
    2. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

1.3. Struktur Organisasi

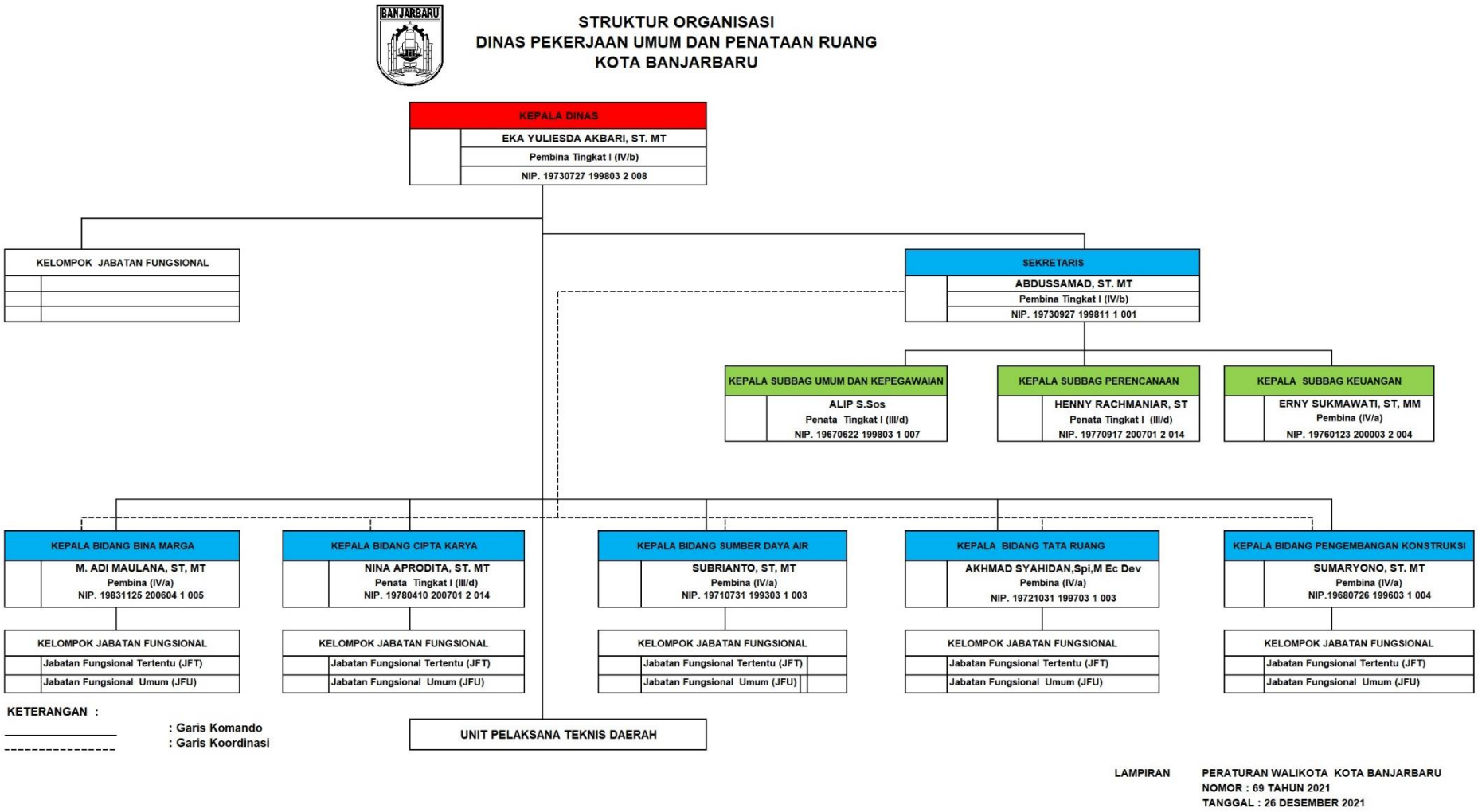

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kapada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis.

Memperhatikan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan juga telah ditetapkannya Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan Perangkat Daerah terhadap masyarakat.
2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal.
3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan
4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal
5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara
6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

1.5. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang , Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi,Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perjanjian Kinerja , Indikator Kinerja Utama , Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut dirumuskan sasaran strategis.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemrintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berangkutan, tetapi termasuk kinerja *(outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarbaru dengan Walikota Banjarbaru dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
Jabatan : Walikota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WALIKOTA BANJARBARU,	KEPALA DINAS,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN	EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
	NIP. 19730727 199803 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan banjir	35,24 %
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,35 %
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97,70 %
3.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100 %
4.	Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	59,85 %
5.	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87,06 %

6.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %
7.	Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100 %
8.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	81,32%
9.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%
10.	Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	70,00%

	Program		**Anggaran**
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	30.159.037.600,-
2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	3.394.892.000,-
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	6.353.015.000,-
4.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	29.697.430.500,-
5.	Pengembangan Permukiman	Rp.	24.293.402.000,-
6.	Penataan Bangunan Gedung	Rp.	5.631.282.750,-

7.	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	275.280.000,-
8.	Penyelenggaraan Jalan	Rp.	57.964.068.314,-
9.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	210.264.500,-
10.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.707.517.500,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WALIKOTA BANJARBARU,	KEPALA DINAS
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN	EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
	NIP. 19730727 199803 2 008

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUSSAMAD, ST, MT
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak Pertama, Sekretaris
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	ABDUSSAMAD, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19730927 199811 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %
		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %
		Cakupan Layanan administrasi Umum yang difasilitasi	Baik
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %
		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp.	70.882.500,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.909.667.885,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	677.556.020,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	733.346.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	403.590.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	481.196.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	ABDUSSAMAD, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19730927 199811 1 001

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBRIANTO, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak Pertama, Kepala Bidang Sumber Daya Air
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	SUBRIANTO, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19710731 199303 1003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG SUMBER DAYA AIR

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkurangnya permasalahan rawan banjir	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	35.34 %
2.	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Persentase kinerja sistem irigasi	69.35 %

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	25.375.460.500,-
2.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah di Kabupaten/Kota	Rp.	4.783.577.100,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya Air

SUBRIANTO, ST, MT
NIP. 19710731 199303 1003

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ADI MAULANA, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Bina Marga
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	M. ADI MAULANA, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19831125 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG BINA MARGA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82.11 %
2.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru	Persentase jalan kota yang terbangun	5,08 %
3.	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	53,23 %

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 57.964.068.314,-
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung, Langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.009.889.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Bina Marga

M. ADI MAULANA, ST, MT
NIP. 19831125 200604 1 005

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINA APRODITA, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak Pertama, Kepala Bidang Cipta Karya
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	NINA APRODITA, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19780410 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG CIPTA KARYA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	97.70 %
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %
3.	Meningkatnya sistem jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	66.46 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	87.06 %
5.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %
6.	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %

	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.394.892.000,-
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.353.015.000,-
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.687.541.500,-

4.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	24.293.402.000,-
5.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp.	5.631.282.750,-
6.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	275.280.000,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	650.800.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	NINA APRODITA, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19780410 200701 2 014

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARYONO, ST. MT.
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	SUMARYONO, ST. MT.
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19680726 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PENGEMBANGAN KONSTRUKSI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis Informasi Jasa Konstruksi menurut SPM PU	100 %
2.	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %
3.	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	57.864.500,-
2.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	152.400.000,-
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	159.999.700,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

SUMARYONO, ST. MT.
NIP. 19680726 199603 1 004

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak Pertama, Kepala Bidang Tata Ruang
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19721031 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG TATA RUANG

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib perencanaan tata ruang kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	25 %
2.	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang	100 %
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100 %

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Rp.	1.127.417.500,-
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	402.400.000,-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	177.700.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Tata Ruang

AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev
NIP. 19721031 199703 1 003

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZABIDI ANSHARI, ST, MT
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Madya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembina Jasa Konstruksi Madya
EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT	ZABIDI ANSHARI, ST,MT
NIP. 19730727 199803 2 008	NIP. 19690228 199703 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan Informasi jasa konstruksi	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis Informasi Jasa Konstruksi menurut SPM PU	100 %

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT
NIP. 19730727 199803 2 008

Pihak Pertama,
Pembina Jasa Konstruksi Madya

ZABIDI ANSHARI, ST,MT
NIP. 19690228 199703 1 010

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIP, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUSSAMAD, ST, MT
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Sekretaris	Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ABDUSSAMAD, ST, MT	ALIP, S.Sos
NIP. 19730927 199811 1 001	NIP. 19670622 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penatausahaan Aset DPUPR sesuai dengan perundang-undangan	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 Laporan
2.	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	4 Paket
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Buah
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	12 Buku
		Jumlah penggandaan yang tersedia	12 Lembar
		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	12 Buah
		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	120 Laporan
3.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah mebel (meja kerja, set meja kerja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	40 Buah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	13 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	17 Buah
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Lainnya yang dapat digunakan	4 Jenis
		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	4 Orang
		Jasa pelayanan umum kantor lainnya	4 Orang

		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	16 Unit
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	15.000.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	369.990.000,-
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	33.600.000,-
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	86.717.600,-
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	195.776.420,-
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	28.500.000,-
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	8.316.000,-
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	358.246.000,-
9.	Pengadaan Mebel	Rp.	263.478.000,-
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	150.449.000,-
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	319.419.000,-
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	35.987.000,-
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	360.074.000,-

15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	16.000.000,-
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	69.135.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Sekretaris	Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ABDUSSAMAD, ST, MT	ALIP, S.Sos
NIP. 19730927 199811 1 001	NIP. 19670622 199803 1 007

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNY SUKMAWATI, ST, MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUSSAMAD, ST, MT
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan
ABDUSSAMAD, ST, MT	ERNY SUKMAWATI, ST, MM
NIP. 19730927 199811 1 001	NIP. 19760123 200003 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB BAGIAN KEUANGAN

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	59 Orang
		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.830.630.916,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	64.037.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris

ABDUSSAMAD, ST, MT
NIP. 19730927 199811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan

ERNY SUKMAWATI, ST, MM
NIP. 19760123 200003 2 004

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNY RACHMANIAR, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUSSAMAD, ST, MT
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
ABDUSSAMAD, ST, MT	HENNY RACHMANIAR, ST
NIP. 19730927 199811 1 001	NIP. 19770917 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERENCANAAN

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya nilai AKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	4 Dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	40.387.000,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	30.495.500,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris

ABDUSSAMAD, ST, MT
NIP. 19730927 199811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan

HENNY RACHMANIAR, ST
NIP. 19770917 200701 2 014

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY SURYA ATMAJA, ST, MT
Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBRIANTO, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa
SUBRIANTO, ST, MT	BENNY SURYA ATMAJA, ST, MT
NIP. 19710731 199303 1 003	NIP. 19770811 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA IRIGASI, DANAU, DAN RAWA
BIDANG SUMBER DAYA AIR

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Infrastruktur irigasi dalam keadaan baik	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	2 Buah
		Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	452.56 Ha
		Luas daerah Irigasi yang dipelihara	358 Ha

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.	619.030.000,-
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.	2.398.376.100,-
3.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.	1.766.171.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa
SUBRIANTO, ST.MT	BENNY SURYA ATMAJA, ST, MT
NIP. 19710731 199303 1 003	NIP. 19770811 201101 1 002

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PIETA WIDHIASARI, ST, MT
Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBRIANTO, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk
SUBRIANTO, ST.MT	PIETA WIDHIASARI, ST, MT
NIP. 19710731 199303 1 003	NIP. 19811022 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SUNGAI DAN WADUK
BIDANG SUMBER DAYA AIR

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Panjang tebing dan tanggul sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan dengan normalisasi, serta infrastruktur pengendali banjir	Panjang sungai dan SDA lainnya yang ditingkatkan	1.612,5 m
		Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara	8.289 m
		Jumlah embung yang dibangun	1 Buah

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Peningkatan Tanggul Sungai	Rp.	10.909.574.000,-
2.	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp.	5.357.821.500,-
3.	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rp.	9.108.065.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Air

SUBRIANTO, ST.MT
NIP. 19710731 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pengembangan
Prasarana Sungai dan Waduk

PIETA WIDHIASARI, ST, MT
NIP. 19811022 200604 2 012

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNI , ST
Jabatan : Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. ADI MAULANA, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Bina Marga	Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
M. ADI MAULANA, ST, MT	WAHYUNI, ST
NIP. 19831125 200604 1 005	NIP. 19770418 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
BIDANG BINA MARGA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	1.000 m
		Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	7.523 m
2.	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Panjang jalan kota yang dibangun	4.978 m
3.	Terlaksananya Rekonstruksi jalan kota	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	8.710 m
		Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	1.000 m
		Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang di bangun	25 m

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp.	1.621.095.000,-
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp.	9.498.780.000,-
3.	Pembangunan Jalan	Rp.	24.446.319.764,-
4.	Rekonstruksi Jalan	Rp.	20.369.023.250,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Marga

M. ADI MAULANA, ST, MT
NIP. 19831125 200604 1 005

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pembangunan
Jalan dan Jembatan

WAHYUNI, ST
NIP. 19831125 200604 1 005

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSNA APRIANI, ST
Jabatan : Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. ADI MAULANA, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Bina Marga	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
M. ADI MAULANA, ST, MT	RUSNA APRIANI, ST
NIP. 19831125 200604 1 005	NIP. 19770419 200701 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
BIDANG BINA MARGA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	395 m
2.	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan kota	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	2.333 m
		Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	830 m
		Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	3.708 m
		Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	6 m

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp.	1.890.014.000,-
2.	Rehabilitasi Jalan	Rp.	5.681.652.250,-
3.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.	2.530.389.000,-
4.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp.	4.046.631.800,-
5.	Rehablitasi Jembatan	Rp.	890.052.250,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Marga

M. ADI MAULANA, ST, MT
NIP. 19831125 200604 1 005

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

RUSNA APRIANI, ST
NIP. 19770419 200701 2 009

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD RIZANI, ST
Jabatan : Sub Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NINA APRODITA, ST. MT
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Cipta Karya	Sub Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
NINA APRODITA, ST. MT	ACHMAD RIZANI, ST
NIP. 19780410 200701 2 014	NIP. 19720527 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BIDANG CIPTA KARYA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sarana dan prasarana air minum dibangun	2.000 m
2.	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan	100 %
		Sarana dan prasarana air limbah yang dibangun	270 KK
3.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan	4.768 m
		Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	6.306 m

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp.	3.394.892.000,-
2.	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rp.	1.287.737.000,-
3.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp.	5.065.278.000,-
4.	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rp.	9.630.574.000,-
5.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Rp.	7.056.967.500,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Cipta Karya	Pihak Pertama, Sub Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
NINA APRODITA, ST. MT	ACHMAD RIZANI, ST
NIP. 19780410 200701 2 014	NIP. 19720527 200604 1 013

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT JULIANI, ST
Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NINA APRODITA, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Cipta Karya	Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
NINA APRODITA, ST, MT	RAHMAT JULIANI, ST
NIP. 19780410 200701 2 014	NIP. 19750701 200604 1 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG BIDANG CIPTA KARYA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang baik dan sedang	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	17.980 m
		Panjang Perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	6.572.62 m
2.	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	1 Unit
		Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara	4 Unit
3.	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	2 Unit
4.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	3 Paket

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	24.293.402.000,-
2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.752.441.000,-
3.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	878.841.750,-

4.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp.	275.280.000,-
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	650.800.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Cipta Karya	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
NINA APRODITA, ST, MT	RAHMAT JULIANI, ST
NIP. 19780410 200701 2 014	NIP. 19750701 200604 1 018

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. YULIANSYAH, MT
Jabatan : Sub Koordinator Peralatan dan Uji Mutu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARYONO, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang	Sub Koordinator
Pengembangan Konstruksi	Peralatan dan Uji Mutu
SUMARYONO, ST, MT	Ir. YULIANSYAH, MT
NIP. 19680726 199603 1 004	NIP. 19650719 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PERALATAN DAN UJI MUTU
BIDANG PENGEMBANGAN KONSTRUKSI

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Paket
2.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 Unit

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	152.400.000,-
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp.	159.999.700,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	Pihak Pertama, Sub Koordinator Peralatan dan Uji Mutu
SUMARYONO, ST, MT	Ir. YULIANSYAH, MT
NIP. 19680726 199603 1 004	NIP. 19650719 199703 1 006

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATHURRAHMANI, ST
Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARYONO, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
SUMARYONO, ST, MT	FATHURRAHMANI, ST
NIP. 19680726 199603 1 004	NIP. 19710929 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI
BIDANG PENGEMBANGAN KONSTRUKSI

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Jumlah Layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pengelolaan operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp.	57.864.500,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
SUMARYONO, ST, MT	FATHURRAHMANI, ST
NIP. 19680726 199603 1 004	NIP. 19710929 200604 1 006

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AULIA RIZHAN,ST
Jabatan : Sub Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Tata Ruang	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	MUHAMMAD AULIA RIZHAN, ST
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19771025 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMANFAATAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TATA RUANG BIDANG TATA RUANG

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya Perizinan Izin Penggunaannya Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100 %

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp.	402.400.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Tata Ruang	Pihak Pertama, Sub Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	MUHAMMAD AULIA RIZHAN, ST
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19771025 200701 1 009

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POPPY SYOFIA YUNIDAR MARTHIANA, ST, MT
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Tata Ruang	Pihak Pertama, Sub Koordinator Perencanaan Dan Penataan Ruang
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	POPPY SYOFIA Y. M., ST, MT
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19820603 200604 2 030

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG
BIDANG TATA RUANG

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	2 dokumen
2.	Tersusunnya dokumen teknis rencana Tata Ruang (RTR)	Jumlah dokumen teknis rencana tata ruang yang disusun	5 dokumen

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp.	201.795.000,-
2.	Penetapan Kebijakan dalan rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp.	925.622.500,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Tata Ruang	Pihak Pertama, Sub Koordinator Perencanaan Dan Penataan Ruang
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	POPPY SYOFIA Y. M., ST, MT
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19820603 200604 2 030

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN NOVIANTARA, ST
Jabatan : Penata Ruang Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Tata Ruang	Penata Ruang Muda
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	IWAN NOVIANTARA, ST
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19781123 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
FUNGSIONAL PENATA RUANG MUDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan peruntukkan ruangnya	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukkan ruangnya	50 lokasi

	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp.	177.700.000,-

Banjarbaru, Oktober 2022

Pihak Kedua, Kepala Bidang Tata Ruang	Pihak Pertama, Penata Ruang Muda
AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec, Dev	IWAN NOVIANTARA, ST
NIP. 19721031 199703 1 003	NIP. 19781123 201001 1 001

2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Lokasi Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok sasaran; Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya. Berikut adalah beberapa rencana kerja tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru :

Tabel 2. 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN PEMUTAKHIRAN		PAGU TAHUN 2022
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG**	
1.03.0.00.0.00.01.00	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**168.773.228.300**
1.03.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.087.038.136**
1.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**70.882.500**
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.387.000
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.495.500
1.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.909.667.916**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.830.630.916
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.037.000
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000
1.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**677.556.020**
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.717.600
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.776.420
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.500.000
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.316.000

1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.246.000
1.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**733.346.000**
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	263.478.000
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.449.000
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	319.419.000
1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**403.590.000**
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.990.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000
1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**1.291.995.700**
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.987.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.074.000
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	159.999.700
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	650.800.000
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.135.000
1.03.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**30.159.037.600**
1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25.375.460.500**
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	9.108.065.000
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	10.909.574.000
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	-
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	5.357.821.500
1.03.02.2.02.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.783.577.100**

1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	619.030.000
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.398.376.100
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.766.171.000
1.03.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**3.394.892.000**
1.03.03.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.394.892.000**
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.394.892.000
1.03.05.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6.353.015.000**
1.03.05.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6.353.015.000**
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.287.737.000
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.278.000
1.03.06.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**29.697.430.500**
1.03.06.2.01.	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**29.697.430.500**
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.621.095.000
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.890.014.000
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	9.498.780.000
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	9.630.574.000
1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	7.056.967.500
1.03.07.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**24.293.402.000**
1.03.07.2.01.	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**24.293.402.000**
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.293.402.000

1.03.08.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**5.631.282.750**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**5.631.282.750**
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.752.441.000
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	878.841.750
1.03.09.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**275.280.000**
1.03.09.2.01.	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**275.280.000**
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	275.280.000
1.03.10.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**57.964.068.314**
1.03.10.2.01.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**57.964.068.314**
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	24.446.319.764
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	20.369.023.250
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	5.681.652.250
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.530.389.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.046.631.800
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	-
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	890.052.250
1.03.11.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**210.264.500**
1.03.11.2.02.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**57.864.500**
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	57.864.500
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	-
1.03.11.2.03.	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**-**
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	-

1.03.11.2.04.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**152.400.000**
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	152.400.000
1.03.12.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.707.517.500**
1.03.12.2.01.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**1.127.417.500**
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	201.795.000
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	-
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	925.622.500
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-
1.03.12.2.03.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**402.400.000**
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	402.400.000
1.03.12.2.04.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**177.700.000**
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	177.700.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah peruwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajeman kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja harus menjawab Perjanjian Kinerja, dan untuk tingkat provinsi harus membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Eselon II

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , dari sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100
3	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota	%	97,70	98,42	100,74
4	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100	100	100
5	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	59,85	60,45	101
6	Persentase Infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	87,06	87,06	100
7	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
8	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100
9	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	81,32	82,66	101,64
10	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
11	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	70	70	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	4
2	Sesuai Target	7
3	Tidak Mencapai Target	-

Sasaran 1 : “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air”

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98	70,07
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100	90,40
	Rata-rata Capaian Kinerja				**105,49**	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase peningkatan perlindungan banjir
2. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Sasaran 1 Indikator 1 : “Persentase peningkatan perlindungan banjir”

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air termasuk didalamnya mengurangi kawasan rawan banjir yang setiap tahunnya terjadi dengan pemeliharaaan sungai, embung/kolam retensi dan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur perlindungan banjir seperti tanggul, perkuatan tebing sungai dan embung. Ada 30 titik rawan banjir yang telah dipetakan, yang diperoleh dari data inventarisasi melalui pengukuran dan pengamatan dilapangan terhadap kejadian banjir di beberapa tahun sebelumnya, yang mana penanganan banjir tersebut tidak bisa dilakukan parsial melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dari hulu ke hilir.

Indikator kinerja adalah persentase peningkatan perlindungan banjir. Indikator ini menunjukan kawasan rawan banjir yang lingkungannya akan diperbaiki dengan infrastruktur pengendali banjir, diharapkan dengan infrastruktur yang dipelihara dan dibangun tersebut banjir dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pengukuran indikator persentase peningkatan perlindungan banjir dihitung berdasarkan panjang sungai yang ditangani dengan infrastruktur pengendali banjir pada tahun ke-n dibagi dengan total panjang sungai yang rencana akan ditangani sampai akhir 2026, kemudian dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator ***Persentase peningkatan perlindungan banjir*** adalah :

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98

Indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 35,24%, dengan realisasi sebesar 39,11%. Capaian kinerja sebesar 110,98 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	60	24,65 / 101,27	39,11/ 110,98

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja

dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun ini yaitu sebesar 39,11%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.6 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	39,11	70,07	-

Realisasi Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2022 sebesar 39,11 % belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 70,07% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan cascading panjang sungai yang ditangani dengan peningkatan kondisi tebing dan tanggul serta normalisasi sungai pada Tahun 2022 adalah sepanjang 13.813 m dari total panjang sungai yang harus ditangani 126.757 m, sedangkan kondisi akhir di Tahun 2021 sebesar 24,65%, dalam pelaksanaannya pada Tahun 2022 realisasi panjang sungai yang tertangani adalah sepanjang 18.333,53 m sehingga capaian target menjadi 39,11%.

Lokasi Banjir terjadi di Kawasan Perumahan, perlindungan yang dilakukan di wilayah sungai sehingga diperlukan peran serta dari unsur lain yang menangani di Kawasan permukiman serta melaksanakan apa yang tertuang di dalam Peraturan Daerah.

4. Upaya yang telah dilakukan

a. Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
b. Mensosialisasikan kepada masyarakat PP No 38 tahun 2011 tentang sungai dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan permanen di atas sempadan sungai.
c. Melakukan Kajian Sempadan Sungai sebagai dasar rencana pembuatan PERDA tentang sempadan sungai.

d. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Sungai Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran Sungai diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 29,28%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
b. Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2022 sebesar Rp. 25.375.460.500 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.946.200.866 atau 70,72 % dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No.	Kegiatan	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.375.460.500	Rp 17.496.200.866	70,72
Jumlah		**Rp 25.375.460.500**	**Rp 17.496.200.866**	**70,72**

Sasaran 1 Indikator 2 : "Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi"

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta untuk menunjang produksi di sektor pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 293/KPTS/M/2014, Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Banjarbaru terdiri dari 11 (sebelas) Daerah Irigasi Permukaan.

Indikator kinerja adalah persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator ini menunjukan luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi, diharapkan dengan infrastruktur yang dibangun tersebut dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian.

1. **Realisasi Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah :

Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100

Indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 69,35%, telah terealisasi sebesar 69,35% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.9 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,87	64,05 / 99,94	69,35 /100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun ini yaitu 69,35%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.10 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,35	90,40	-

Realisasi Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 sebesar 69,35% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 90,40% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada akhir tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Secara garis besar seluruh paket pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak hingga akhir masa pelaksanaan walaupun ada beberapa hambatan di lapangan karena cuaca.

4. Upaya yang telah dilakukan

a. Pencapaian indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu melakukan pengawasan oleh bidang dibantu oleh Konsultan Pengawas mengenai progress fisik di lapangan dan segera melakukan rapat untuk mencari solusi apabila ditemui kendala pada masa pelaksanaan.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 4,55%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :

Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 sebesar Rp. 4.783.577.100 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.566.052.100 atau 95,45 % dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No.	Kegiatan	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.783.577.100	Rp 4.566.052.100	95,45
Jumlah		**Rp 4.783.577.100**	**Rp 4.566.052.100**	**95,45**

Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	97,70	98,42	100,74	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100,74**	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota.

Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah suatu sistem yang di dalamnya mencakup proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/ IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke *reservoir (offtake)*, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Indikator kinerja adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota. Indikator ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses air minum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota adalah :

Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	97,70	98,42	100,74

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 97,70% dan telah terealisasi sebesar 98,42% sehingga Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,74%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	94,50	97,15 / 100,62	98,42 / 100,74

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun ini yaitu 98,42%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.15 Perbandingan RPJMD dan Nasional Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	98,42	100	100

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun 2022 sebesar 98,42% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan belum mencapai target nasional dengan capaian 100%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100,74% dari target awal tahun sebesar 97,70% dan akhir tahun realisasi sebesar 98,42%, target yang dicapai lebih dari rencana dikarenalkan adanya reviu terhadap kondisi existing serta adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan. Adanya penambahan pagu anggaran mempengaruhi realisasi Panjang jaringan perpipaan yang terpasang yang akhirnya menentukan penambahan jumlah KK yang terlayani sistem air minum dibagi jumlah total KK se Kota Banjarbaru sehingga persentase KK yang mendapatkan akses air minum yang aman berupa pipa sambungan rumah yang dipasang oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagai salah satu Perusahaan satu2nya penyelenggara SPAM Kerjasama antara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Hal lain juga disebabkan masyarakat Kota Banjarbaru mulai bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum.

4. Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman melebihi dari target semula.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 14,83%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan besarnya pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun 2022 sebesar Rp 3.394.892.000,00 dantelah direalisasikan sebesarRp. 2.891.412.000,00 atau 85,17% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Keuangan Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.394.892.000	2.891.412.000	85,17
Jumlah		**Rp. 3.394.892.000**	**Rp. 2.891.412.000**	**85,17**

Sasaran 3 : “Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah”

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota

Sasaran 3 Indikator 1 : “Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota”

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke dalam air atau pun meresap ke dalam tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemaran pada air lingkungan terutama di daerah perkotaan.

Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota adalah :

Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100% dan telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.19 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di Kota	100	100 /100	100/ 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota tahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.20 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100	100	100

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota tahun 2022 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan mecapai target nasional dengan capaian 100%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja 100% hal ini dikarenakan akses layak dan akses aman sudah mencapai 100%.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 6,13%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

b. Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota tahun 2022 sebesar Rp 6.353.015.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.963.275.000,00 atau 93,87% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Keuangan Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.353.015.000	5.963.275.000	93,87
Jumlah		**Rp. 6.353.015.000**	**Rp. 5.963.275.000**	**93,87**

Sasaran 4 : “Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase”

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	59,85	60,45	101	67,94
	Rata-rata Capaian Kinerja				**101**	

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase saluran drainase yang berfungsi baik

Sasaran 4 Indikator 1 : "Persentase saluran drainase yang berfungsi baik"

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menggambarkan kondisi saluran drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang telah dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2022 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya persentase saluran drainase yang berfungsi baik diukur berdasarkan hasil dari panjang drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang berfungsi baik (sampai dengan tahun 2022) dibagi total target panjang drainase jalan kota (2 kali panjang jalan kota) berdasarkan SK Jalan Kota Tahun 2016 dan SK Jalan Lingkungan Tahun 2018.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik adalah :

Tabel 3.23 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	59,85	60,45	101

Indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 59,85%, telah terealisasi yaitu 60,45%. Capaian kinerjanya ini sebesar 101%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	71,70	58,56 / 101,20	60,45 / 101

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun ini yaitu 60,45%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.25 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	60,45	67,94	-

Realisasi Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2022 sebesar 60,45% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 67,94% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik, yang merupakan gabungan antara 2 indikator target yaitu “Persentase Saluran Drainase Jalan Kota yang Berfungsi Baik dan Persentase Saluran Drainase Jalan Lingkungan yang Berfungsi Baik”, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dan dilaksanakan oleh 2 Bidang (Bina Marga dan Cipta Karya), dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui APBD Perubahan 2022 untuk Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sehingga

realisasi/output pada sub kegiatan tersebut (6.898 m) melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra/Cascading (4.441 m).

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan oleh bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 6,57 %. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   I. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
      c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
      d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2022 sebesar Rp. 29.697.430.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 27.747.262.500,00 atau 93,43% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	29.697.430.500	27.747.262.500	93,43
Jumlah		**Rp. 29.697.430.500**	**Rp. 27.747.262.500**	**93,43**

Sasaran 5 : “Meningkatnya Pengembangan Permukiman”

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 27 Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Pengembangan Permukiman

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	87,06	87,06	100	93,06
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengembangan Permukiman dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik

Sasaran 5 Indikator 1 : “Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik”

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan menggambarkan kondisi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2022 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2022) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan lingkungan dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengembangan permukiman dengan indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah :

Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 5
Meningkatnya Pengembangan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	87,06	87,06	100

Indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 87,06%, telah terealisasi sebesar 87,06% sehingga Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.29 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 5
Meningkatnya Pengembangan Permukiman

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	76,05	85,56 / 100	87,06 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator

Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun ini yaitu 87,06 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.30 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 5
Meningkatnya Pengembangan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87,06	93,06	-

Realisasi Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 87,06% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,06% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dikarenakan adanya perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang di tentukan yaitu sepanjang 21.779 m.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Realisasi Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik didukung oleh Program Pengembangan Permukimanyang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 3,51%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Permukiman

I. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar Rp. 24.293.402.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 23.441.239.500,00 atau 96,49% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Sasaran 5
Meningkatnya Pengembangan Permukiman

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Permukiman	24.293.402.000	23.441.239.500	96,49
Jumlah		**Rp. 24.293.402.000**	**Rp. 23.441.239.500**	**96,49**

Sasaran 6 : “Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung”

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.32 Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik

Sasaran 6 Indikator 1 : “Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik”

Meningkatnya Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik melalui kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota bertujuan agar dapat menambah fasilitas perkantoran dan fasilitas umum di Kota Banjarbaru yang lebih baik dan sesuai dengan Standar.

Indikator Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penataan bangunan gedung dengan indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah :

Tabel 3.33 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 6
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100

Indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 100%,telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.34 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 6 Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100 / 100	100 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.35 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 6 Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	-

Realisasi Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dikarenakan pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota semua pekerjaan pembangunan terselesaikan tepat waktu.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedungyang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 14,93%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penataan Bangunan Gedung
    I. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
        a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
        b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar Rp. 5.631.282.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.790.302.000,00 atau 85,07% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Sasaran 6
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan Bangunan Gedung	5.631.282.750	4.790.302.000	85,07
Jumlah		**Rp. 5.631.282.750**	**Rp. 4.790.302.000**	**85,07**

Sasaran 7 : “Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya”

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik

Sasaran 7 Indikator 1 : “Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata Baik”

Meningkatnya Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik melalui kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan diharapkan dapat meningkatkan prasarana fasilitas umum berupa Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh pengguna.

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan bertujuan agar dapat menambah fasilitas umum di Kota Banjarbaru yang lebih baik dan sesuai dengan Standar. Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik adalah :

Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No.	Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100

Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.39 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	**Indikator Sasaran**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
		Realisasi / capaian	**Realisasi / capaian**	**Realisasi / capaian**
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	99,70	100 / 100	100 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.40 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100	100	-

Realisasi Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2022 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan

dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dikarenakan perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baiktahun didukung oleh Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 10,12%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertata baik ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
    I. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
        a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2022 sebesar Rp. 275.280.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 247.411.000,00 atau 89,88% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.41 Realisasi Keuangan Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	275.280.000	247.411.000	89,88
Jumlah		**Rp. 275.280.000**	**Rp. 247.411.000**	**89,88**

Sasaran 8 : “Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan”

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.42 Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	81,32	82,66	101,64	81,87
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100,07**	

Sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota

Sasaran 8 Indikator 1 : “Tingkat Kemantapan Jalan Kota”

Meningkatnya kemantapan jalan kota menggambarkan kondisi jalan dan jembatan yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2022 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan kota diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2022) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan kota dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan kota adalah :

Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	%	81,32	82,66	101,64

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 81,32%, telah terealisasi yaitu 82,66%. Capaian kinerjanya sebesar 101,64%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.44 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	96,94	81,27 / 100,07	82,66 / 101,64

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota tahun ini yaitu 82,66%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.45 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	82,66	81,87	-

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan kotatahun 2022 sebesar 82,66 % realisasi ini melebihi target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota. Realisasi untuk indikator tersebut diukur dari capaian output 6 (enam) sub kegiatan yaitu Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Rehabilitasi Jembatan. Keberhasilan capaian kinerja dari program ini dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kemantapan jalan kota dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui ABPB Perubahan 2022 untuk sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sehingga realisasi/output pada sub kegiatan tersebut (3.653 m) melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra/Cascading (2.744 m) serta pada sub kegiatan Pembangunan Jalan terdapat realisasi/output yang menunjang pencapaian target tingkat kemantapan jalan kota (6.338 m).

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 4,58%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
    I. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
        a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
        b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
        c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
        d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
        e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
        f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota tahun 2022 sebesar Rp. 57.964.068.314,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 55.310.759.997,00 atau 95,42 % dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.46 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8
Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	57.964.068.314	55.310.759.997	95,42
Jumlah		**Rp. 57.964.068.314**	**Rp. 55.310.759.997**	**95,42**

Sasaran 9 : “Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi”

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 47 Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Sasaran 9 Indikator 1 : "Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi"

Meningkatnya pembinaan dan pengawasaan usaha jasa konstruksi menggambarkan penilaian kinerja yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasaan layanan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Meningkatnya pengawasan usaha jasa konstruksi di ukur berdasarkan persentase layanan informasi jasa konstruksi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksidengan indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi adalah :

Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 9 Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100

Indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.49 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 9
Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	100 / 100	100 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksitahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.50 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 9
Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	100	-

Realisasi Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tahun tahun 2022 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki indikator Persentase layanan informasi pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dikarenakan

4. Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi didukung oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 4,47%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   I. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

   II. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

   a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi kota tahun 2022 sebesar Rp. 210.264.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 200.872.500 atau 95,53% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.51 Realisasi Keuangan Sasaran 9
Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	210.264.500	200.872.500	95,53
Jumlah		**Rp. 210.264.500**	**Rp. 200.872.500**	**95,53**

Sasaran 10 : “Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang”

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.52 Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	70	70	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**	

Sasaran kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sasaran 10 Indikator 1 : “Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruangdengan indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah :

Tabel 3.53 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	70	70	100

Indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 70%,telah terealisasi yaitu 70%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.54 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100	67,53 / 101,81	70 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2020 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator

Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun ini yaitu 70%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.55 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	70	100	-

Realisasi Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)tahun 2022 sebesar 70 %,realisasi ini belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Perubahan Peraturan Daerah

4. Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 10,63%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   I. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW.
b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

II. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

III. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota tahun 2022 sebesar Rp. 1.127.417.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.007.601.515,00 atau 89,37 % dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.56 Realisasi Keuangan Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.127.417.500	1.007.601.515	89,37
Jumlah		**Rp. 1.127.417.500**	**Rp. 1.007.601.515**	**89,37**

A. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2022 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 147.571.265.440,00 dan mengalami perubahan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru adalah sebesar **Rp. 168.773.228.300,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 153.295.381.512,00** atau dengan serapan dana APBD-P mencapai **90,83%**.

Gambar 3.1
Grafik Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2022

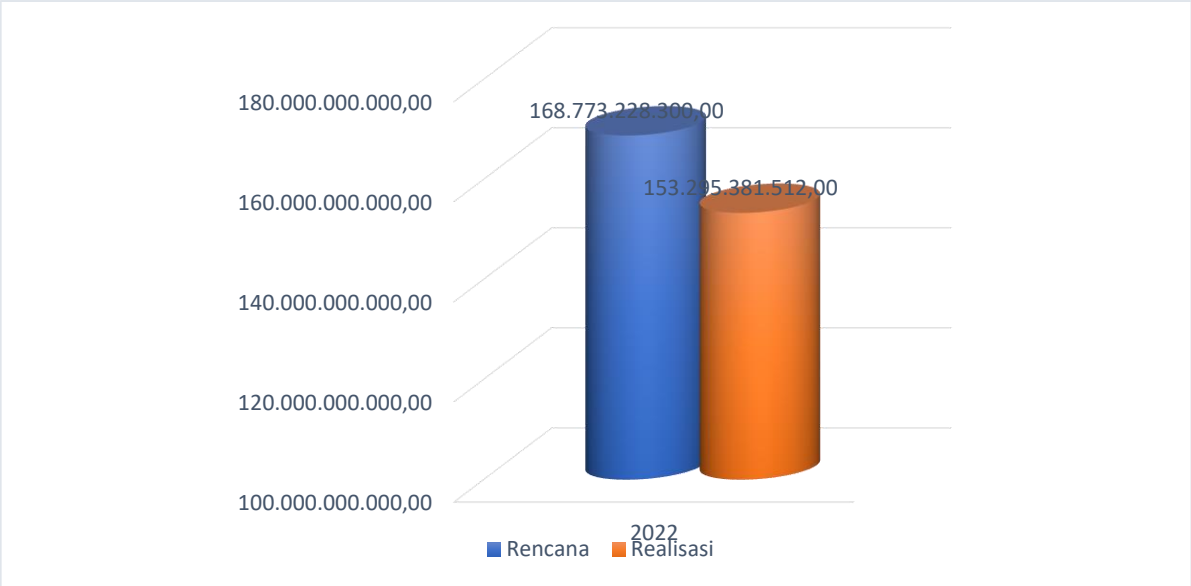

Gambar 3.2
Grafik Persentase Realisasi Keuangan per Tahun

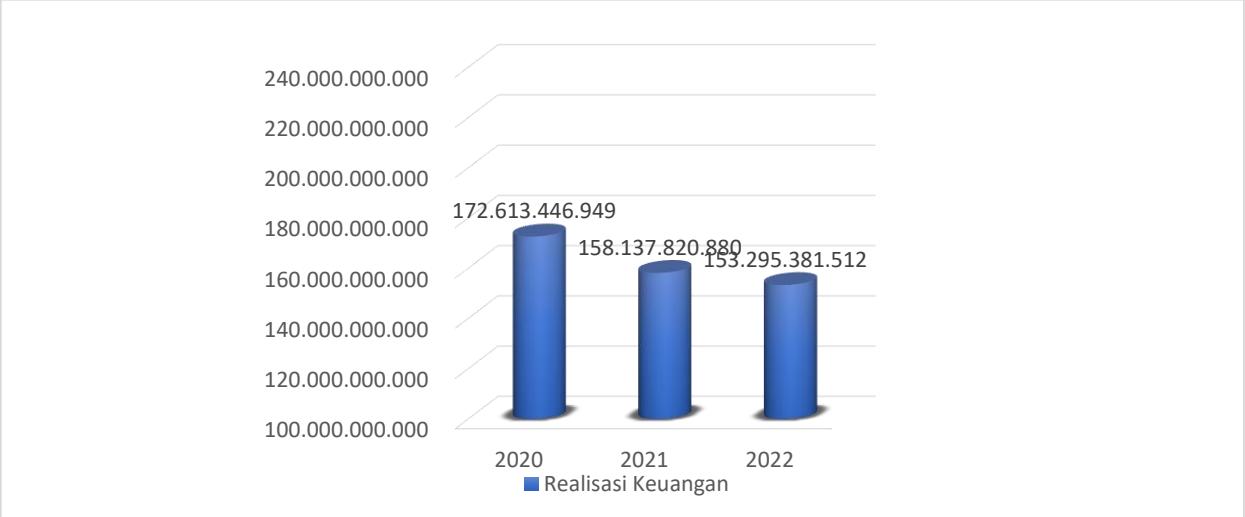

3.2. Capaian Kinerja Eselon III

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Capaian kinerja Eselon III Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Berkurangnya permasalahan rawan banjir	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	35.24 %	39,11 %	110,98 %
2.	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Persentase kinerja sistem irigasi	69.35 %	69,35 %	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai 2 (Dua) Indikator Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air yaitu antara lain :

a. ***Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun***.

b. ***Persentase kinerja sistem irigasi***

1. Pada tahun 2022 bidang Sumber Daya Air melalui seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk menganggarkan pembelian tanah untuk Pembangunan Embung sebagai salah satu upaya mitigasi atau pengurangan banjir di Kota Banjarbaru. Proses pembelian tanah ini bekerjasama dan berkoordinasi beberapa pihak instansi terkait antara lain BPN Kota Banjarbaru, Camat, Lurah dengan membentuk suatu tim serta dilakukan pendekatan kepada seluruh pemilik tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan embung dan proses pembelian sesuai harga yang sudah ditentukan oleh Tim Appraisal sampai dengan proses pembayaran di akhir tahun anggaran.

   Mensosialisasikan Kebijakan untuk pekerjaan peningkatan/pelebaran sungai dilakukan dengan sistem hibah kepada masyarakat, bukan dengan membeli tanah pada daerah Sempadan Sungai yang banyak dikuasai kepemilikan tanahnya oleh warga.

2. Sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Sumber Daya Air Kota Banjarbaru

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air yaitu :

1. Terbatasnya lahan untuk pekerjaan peningkatan/pelebaran sungai.
2. Perubahan Kondisi lapangan pada saat perencanaan dengan pada saat pelaksanakan dikarenakan terjadi erosi sedimentasi serta tidak tersedianya data tanah.
3. Kondisi akses mobilisasi material yang jauh dan sempit serta iklim dan cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air sungai menyebabkan terlambatnya pekerjaan pembangunan inlet embung cempaka akan tetapi untuk pekerjaan normalisasi (pemeliharaan) sungai target bisa terlampaui.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Merencanakan pembuatan check dam sebagai salah satu upaya pengurangan banjir.
2. Mengusahakan percepatan proses pemilihan penyedia pada awal tahun.
3. Berkoordinasi dengan Pihak Balai dan Dinas PUPR Provinsi untuk sinkronisasi paket-paket pekerjaan sebagai upaya untuk mendukung capaian indikator pada Bidang Sumber Daya Air.

2. Kepala Bidang Bina Marga

Capaian kinerja Eselon III Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Bina Marga

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82.11 %	83,24 %	101,38 %
2.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru	Persentase jalan kota yang terbangun	5,08 %	4,59 %	90,35 %
3.	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	53,23 %	53,98 %	101,40 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Bina Marga yaitu :

1. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran jalan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru.
3. Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/suplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

4. Melakukan updating atau menginventarisasi saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat dengan melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
5. Mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan mereka dengan melakukan pembersihan dari tanah endapan dan sampah-sampah agar aliran airnya bisa lancar sehingga saluran drainase bisa berfungsi baik.
6. Membuat sumur-sumur resapan di titik genangan yang sering terjadi sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tidak lancarnya aliran air di saluran.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Bina Marga yaitu :

1. Tidak tersedianya tanah atau lahan untuk pembangunan atau peningkatan atau pelebaran jalan
2. Penolakan masyarakat terhadap pekerjaan bidang Bina Marga.
3. Pekerjaan yang menggunakan material dari penyedia/suplier memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik tersedia.
4. Masih banyaknya saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat yang belum maksimal ditangani karena keterbatasan anggaran.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase karena sebagian besar kondisi saluran yang tidak lancar disebabkan banyaknya endapan yang tidak dibersihkan.
6. Adanya saluran-saluran yang masih belum tuntas penanganannya karena masih adanya penolakan warga terhadap penanganan drainase ke pembuangan akhir yang mengalir ke tanah warga.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai keperluan berdasarkan dokumen perencanaan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru.
3. Membuat perjanjian yang mengikat antara kontraktor dan penyedia/suplier dalam hal penyediaan material.
4. Melakukan inventaris data usulan masyarakat terkait permasalahan dan penanganan drainase baik melalui usulan musrenbang atau laporan masyarakat agar bisa ditangani setiap tahunnya melalui sub kegiatan pembangan sistem drainase perkotaan, sub kegiatan peningkatan saluran drainase perkotaan dan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
5. Memberikan penjelasan dan pendekatan kepada warga yang terdampak sebagian tanahnya untuk dihibahkan untuk penanganan saluran drainase supaya bisa tuntas ke saluran pembuangan akhirnya agar hasilnya saluran drainase bisa berfungsi baik.

3. Kepala Bidang Cipta Karya

Capaian kinerja Eselon III Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.59 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Cipta Karya

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	97.70 %	98,42 %	100,74 %

2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya sistem jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	66.46 %	66,92 %	100,69 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	87.06 %	87,06 %	87,06 %
5.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100%

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya yaitu :

1. Dalam rangka meningkatkan prosentase air minum yang aman menuju 100% pada tahun 2024 nanti, Bidang Cipta Karya berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman melalu pembangunan jaringan distribusi sekunder dan tersier perpipaan air minum diameter 2-8 inch yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Selain itu, untuk meng-cover Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu membayar biaya berlangganan PTAM Intan Banjar, telah direncanakan jaringan perpipaan non PTAM yang rencananya fisik

konstruksinya akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisisk Bidang Air Minum pada tahun 2023.

2. Untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatasi banjir dan genangan yang kerap terjadi di Kota Banjarbaru, Bidang Cipta Karya berupaya melaksanakan drainase yang berwawasan lingkungan, agar air hujan yang menggenang di permukaan tidak begitu saja langsung dibuang ke drainase primer atau sungai, yaitu melalui pembangunan sumur resapan yang tersebar di Kota Banjarbaru. Sumur serapan dipasang di beberapa titik yang ditengarai memiliki andil dalam menciptakan volume debit air hujan yang relatif cukup besar. Air yang masuk ke dalam sumur resapan diharapkan dapat mengurangi genangan yang terjadi di sekitar daerah tersebut dan dapat menjadi cadangan air tanah bagi lingkungan sekitar. Selain itu, Bidang Cipta Karya sebagai pelaksana kewenangan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan di perumahan, berupaya mengkoneksikan baik drainase yang sudah terbangun maupun yang akan terbangun, dengan drainase sekunder ataupun drainase primer dengan tetap mengacu kepada pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan (eco-drainage), yaitu drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan ataupun kolam detensi/retensi mini.
3. Untuk mencapai akses sanitasi aman bagi masyarakat Kota Banjarbaru, Bidang Cipta Karya berupaya membangun infrastruktur sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sejak 2022 Bidang Cipta Karya juga berupaya untuk ikut berkolaborasi dalam mengintervensi pencegahan stunting bagi balita. Hal ini dilakukan melalui pembangunan tangki septik individual yangn didanai melalui Dana Alkasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi dan pembangunan WC melalui APBD Kota Banjarbaru. Kegiatan ini rencananya akan tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang sampai seluruh rumah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki balita yang tersuspek akan mengalami stunting telah memiliki akses sanitasi dan air minum yang aman.
4. Bidang Cipta Karya dalam meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, berupaya melalui peningkatan jalan lingkungan di komplek perumahan. Sebagaimana arahan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, peningkatan jalan lingkungan dilaksanakan pada aset-aset fasilitas PSU perumahan yang keberadaan asetnya telah melalui proses serah terima aset dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Bidang Cipta Karya berupaya agar seluruh jalan lingkungan yang telah dilaksanakan peningkatannya, dimasukkan dalam database rencana inventarisasi jalan lingkungan yang akan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru di tahun 2023 nanti.

5. Dalam upaya meningkatkan penataan bangunan gedung negara dalam kondisi baik, Bidang Cipta Karya berupaya membangun dan merencanakan pembangunan kantor-kantor pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya. Sejak kuartal kedua 2022, Bidang Cipta Karya tidak lagi melaksanakan rehabilitasi atau pemeliharaan kantor-kantor di lingkup Pemerintah Kota Banajrbaru. Hal ini merupakan hasil dari saran tindak/temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap hal ini. Menurut BPK, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan kantor merupakan tanggung jawab dari SKPD masing-masing, karena terkait dengan aset kepemilikan dari gedung tersebut yang tidak dapat dicatatkan pada Dinas PUPR terhadap belanja modal yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR dari kegiatan tersebut.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya yaitu :

1. Dalam pembangunan jaringan air minum skala distribusi sekunder dan tersier, sebagaimana kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru, sering dihadapkan pada belum terkoneksinya secara keseluruhan jaringan pipa PTAM Intan Banjar. Selain itu distribusi air minum melalui jaringan primer, jairngan pipa Banjarbakula seringkali mengalami perbaikan, yang mengakibatkan air minum tidak mengalir dengan lancar atau

bahkan mengalami mati total pada hari-hari tertentu ada saat perbaikan dilaksanakan.

2. Dalam pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan, Bidang Cipta Karya sering dihadapkan pada terbatasnya pendanaan dalam mebuat jaringan drainase lingkungan yang dapat menampung kelebihan air hujan. Oleh karenanya, Bidang Cipta Karya berupaya keras agar melalu pendanaan yang ada hanya dialokasikan pada lokasi-lokasi prioritas saja. Kurangnya tanggung jawab pengembang perumahan terhadap pembangunan jalan dan drainase lingkungan pada PSU yang diserahkan mereka pada Pemerintah Kota Banjarbaru, menyebabkan porsi pembangunan infrastruktur yang seharusnya dikerjakan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Sehingga akibatnya wilayah-wilayah genangan air bertambah, karena beberapa perumahan membangun di daerah tangkapan maupun resapan air.
3. Untuk akses aman sanitasi, selama ini masih kurangnya kesadaran warga untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Mereka masih berpendapat, bahwa tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan tangki septik yang aman. Padahal tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan indikator bahwa tangki septik mereka telah mencemari air tanah, karena tinja/black water telah menyebar ke mana-mana di bawah tanah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Bidang Cipta Karya, di tahun-tahun mendatang apabila terjadi peristiwa mati total air minum terjadi, berencana akan mendistribusikan air minum gratis bagi warga yang terdampak mati total pada saat perbaikan pipa jarngan primer Banjarbakula maupun ppa jaringan PTAM Intan Banjar sedang berlangsung. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumur bor, pembelian mobil tangki air untuk mendistribusikan air minum dan pembangunan stasiun pengisian air minum cadangan di beberapa titik

yang padat penduduk. Selain itu, di tahun 2023, Bidang Cipta Karya juga akan melakukan inisiasi pendampingan terhadap pasca konstruksi pembangunan sumur bor yang tersebar di Kecamatan Cempaka, agar Kelompok Penggunan dan Pemanfaat (KPP) pada daerah tersebut dapat memiliki daya saing usaha pemanfaatan air baku yang akan dijadikan air minum dan dapat dijual kepada warga sekitar yang membutuhkan. Hal ini dapat menjadi inisiasi awal sirkular ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi warga MBR.

2. Untuk tindak lanjut masalah banjir dan genangan, perlu adanya komitmen bersama yang dituangkan melalui rapat/sosialisasi/pendekatan, Focus Group Discussion (FGD) bersama pengembang ataupun penandatanganan Pakta Integritas agar pihak swasta/pengembang turut bertanggung jawab membangun dari awal jalan maupun drainase lingkungan di area yang akan dikembangkan mereka.
3. Selain itu, perlu adanya pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan secara masif, tuntas dan komprehensif pada tahun yang bersamaan, melalui kolaborasi dan integrasi pembangunan bersama/ develop bundling pada bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Pembangunan /pemeliharaan/rehabilitasi dilakukan dengan membagi beberapa area berdasarkan catchment area dan berdasarkan studi/kajian/masterplan yang telah dilakukan. Sehingga penanganan dapat tuntas tanpa meninggalkan masalah dikemudian hari.
4. Untuk penuntasan akses sanitasi aman, Bidang Cipta Karya telah membuat beberapa prototipe DED Tangki Septik dan bangunan WC di atasnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tanah eksisting dan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Gunanya agar di tahun-tahun mendatang, selain melalui mekanisme pendanaan melalui DAK dan APBD, juga melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).

4 . Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

Capaian kinerja Eselon III Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis Informasi Jasa Konstruksi menurut SPM PU	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi yaitu :

1. Pembentukan tim teknis ketersediaan data dan informasi/ pengawasan usaha jasa konstruksi nasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk memenuhi sasaran kinerja tersebut.
2. Pembentukan tim uji mutu untuk melakukan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi yaitu :

1. Tidak bisa mengakses data dan informasi usaha jasa konstruksi melalui LPJK.net sehingga data yang didapatkan hanya bisa melalui proses manual (survey ke lapangan).
2. Koordinasi antar bidang dalam rangka uji mutu.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Melakukan survey kelapangan secara berkala sehingga data yang didapatkan selalu terupdate.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang.

5 . Kepala Bidang Tata Ruang

Capaian kinerja Eselon III Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Tata Ruang

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tertib perencanaan tata ruang kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	25 %	25 %	100 %
2.	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang	100 %	83,45%	83,45%
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100 %	100 %	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang yaitu :

1. Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan beberapa pihak pada upaya pemenuhan Dokumen Revisi RTRW Kota Banjarbaru.
2. Melakukan ekspose ke Kementerian ATR sebagai dari tahapan pemenuhan Revisi Dokumen RTRW Kota Banjarbaru.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang yaitu:

1. Data yang diperlukan di tingkat Kota masih sedikit/tidak tersedia di OPD terkait
2. Data yang diperlukan di tingkat nasional memerlukan birokrasi yang panjang/belum ditetapkan

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Tetap melakukan koordinasi dan memenuhi tahapan dari proses Revisi Dokumen RTRW Kota Banjarbaru.

3.3. Capaian Kinerja Eselon IV (Sub. Koordinator)

1. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Panjang tebing dan tanggul sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan dengan normalisasi, serta infrastruktur pengendali banjir	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan	1.612,5 m	1.543,53 m	95,70 %
		Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara	8.289 m	16.790 m	202,55 %
		Jumlah embung yang dibangun	1 Buah	1 Buah	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk yaitu :

1. Terlaksananya seluruh paket pekerjaan yang telah dianggarkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai.
2. Terlaksananya seluruh paket pekerjaan yang telah dianggarkan pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tebing dan Tanggul Sungai.
3. Terlaksananya paket pekerjaan Pembangunan Embung.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk yaitu kondisi akses mobilisasi material yang jauh dan sempit serta iklim dan cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air sungai menyebabkan terlambatnya pekerjaan pembangunan inlet embung cempaka akan tetapi untuk pekerjaan normalisasi (pemeliharaan) sungai target bisa terlampaui.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

Mempercepat proses pemilihan penyedia sehingga proses pengerjaan di lapangan diharapkan juga lebih cepat serta tetap melakukan koordinasi dengan pihak penyedia mengenai pola kerja lansir material di lapangan.

2. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.63 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Infrastruktur irigasi dalam keadaan baik	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	2 Buah	2 buah	100
		Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	452,26 Ha	452,26 Ha	100
		Luas daerah Irigasi yang dipelihara	358 Ha	358	100

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa yaitu :

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
2. Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat setempat dan yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan.
3. Melakukan pengawasan dari pihak pengawas lapangan didampingi konsultan pengawas secara berkala kepada pihak pelaksana berkaitan dengan proses pekerjaan.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa yaitu:

1. Mobilisasi material yang tidak bisa langsung ke lokasi kegiatan.
2. Iklim dan cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air.
3. Pada saat musim panen kegiatan mengalami hambatan dikarenakan mobilisasi hasil panen.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

1. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kelompok tani dan tokoh setempat untuk kegiatan selanjutnya.
2. Lelang dipercepat untuk menghindari musim hujan yang tidak menentu.

3. Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.64 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	1.000 m	1.000 m	100 %
		Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	7.523 m	7.523 m	100 %
2.	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Panjang jalan kota yang dibangun	4.978 m	4.978 m	100 %
3.	Terlaksananya Rekonstruksi jalan kota	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	8.710 m	8.710 m	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan yaitu :

1. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.
2. Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/suplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan yaitu:

1. Penolakan masyarakat terhadap pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
2. Pekerjaan yang menggunakan material dari penyedia/suplier memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik tersedia.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu

1. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.

2. Membuat perjanjian yang mengikat antara kontraktor dan penyedia/suplier dalam hal penyediaan material.

4. Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.65 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	395 m	395 m	100
2.	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan kota	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	2.333 m	2.333 m	100 %
		Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	830 m	830 m	100 %
		Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	3.708 m	3.708 m	100 %
		Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	6 m	6 m	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yaitu :

1. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.
2. Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/suplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yaitu:

1. Penolakan masyarakat terhadap pekerjaan bidang Bina Marga.
2. Pekerjaan yang menggunakan material dari penyedia/suplier memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik tersedia.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu mempercepat pelaksanaan lelang sehingga proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai target waktu pelaksanaan.

1. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Membuat perjanjian yang mengikat antara kontraktor dan penyedia/suplier dalam hal penyediaan material.

5. Sub. Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sarana dan prasarana air minum dibangun	2.000 m	2.679 m	133,95%
2.	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan	100 %	100 %	100 %
		Sarana dan prasarana air	270 KK	191 KK	70,74 %

		limbah yang dibangun			
3.	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan	4.768 m	5.792 m	121,47 %
		Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	6.306 m	9.336 m	165,97 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan adalah pembangunan jaringan perpipaan air minum yang didanai melalui DAK maupun APBD. Fokus pembangunan jaringan dilaksanakan pada kelurahan yang prosentase akses air minum amannya masih relatif kecil. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Subkoordinator Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (Subkor ABPL) bersama-sama dengan PTAM Intan Banjar merencanakan fokus pembangunan jaringan kepada perumahan-perumahan subsidi yang mayoritas sudah berpenghuni dan PSU telah diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Untuk penuntasan akses sanitasi dan air minum aman untuk kasus prevalensi stunting, Subkor ABPL bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan DP2KBPMP2A dalam perolehan data primer melalui tarikan data e-PPGBM dan SSGI agar diperoleh data terverifikasi by name by address balita stunting dan akan stunting, untuk diintervensi akses aman mereka terhadap air minum dan sanitasi.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Di Kota Banjarbaru, khususnya wilayah Kecamatan Cempaka, dimana terdapat mayoritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pencapaian akses air minum aman yang dilaksanakan terkendala pada keengganan masyarakat untuk berlangganan air PTAM Intan Banjar. Preferensi mereka adalah melalui pemanfaatan sumur dangkal. Beberapa temuan survey yang dilakukan Subkor ABPL di lapangan, ada beberapa sumur yang dimanfaatkan warga secara bersama-sama. Mereka meletakkan pipa-pipa distribusi SR

pada sumur ini dan dikoneksikan ke rumah masing-masing. Tentu saja, dari segi higienitas, hal ini kurang memenuhi standar.

Dalam pengentasan banjir dan genangan, Subkor ABPL ssering dihadapkan pada usulan drainase yang tidak prioritas maupun hanya penuntasan setempat dan bersifat jangka pendek, sehingga penanganan tidak tuntas. Selain itu, keterbatasan pendanaan juga memiliki peranan dalam kurangnya penanganan secara masif terhadap genangan dan banjir yang semakin sering terjadi di Kota Banjarbaru.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu melalui pencapaian akses air minum aman baik dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat maupun penyediaan akses air minum aman berupa sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga eligibility akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

Untuk penanganan drainase berwawasan lingkungan, Subkor ABPL mengacu kepada kajian pada Master Plan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru, dan tetap memprioritaskan penanganan pada lokasi-lokasi yang benar-benar terdampak sesuai kewenangan penanganan drainase lingkungan Bidang Cipta Karya. Untuk penuntasan akses sanitasi aman, Subkor ABPL masih menggunakan data tematik seperti e-PPGBM dan SSGI untuk intervensi prevalensi stunting.

6. Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.67 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang baik dan sedang	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	17.980 m	24.157,64	134,36 %
		Panjang Perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	6.572,62 m	13.952,32	233,15 %
2.	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100 %
		Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara	4 Unit	3 Unit	100 %
3.	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	2 Unit	4 Unit	100 %
4.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	3 Paket	1 Paket	100%

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung yaitu melalui peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kota Banjarbaru. Pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan terus ditingkatkan kualitas perencanaannya sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan aturan turunannya.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung yaitu pada saat pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan, masih dijumpai tantangan berupa variasi ketebalan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) yang tidak konsisten di lapangan. Selain itu, karena peningkatan pembangunan perumahan yang masif oleh pengembang perumahan yang tidak dibarengi dengan pembangunan jalan lingkungan yang langsung dibangun oleh mereka mengakibatkan banyaknya jalan lingkungan yang masih dalam kondisi hanya memiliki LPB dan LPA saja tanpa lapisan aspal, mengakibatkan kondisi jalan-jalan ini banyak yang sudah tergerus lapisan atasnya akibat air hujan. Sehingga tidak tercapai kondisi pemadatan yang ideal pada saat rencana pekerjaan pengasapalan jalan, setelah beberapa tahun menunggu pendanaan mencukupi untuk pekerjaan aspal di wilayah tersebut.

Selain itu, banyaknya bangunan gedung baik milik Pemerintah Kota Banjarbaru maupun instansi pusat/vertikal dan milik perseorangan yang sudah berusia tua, dan ditengarai dapat dicanangkan sebagai bangunan cagar budaya, selama ini sedikit sekali informasi teknis mengenai keberadaan dan struktur bangunan tersebut.Sehingga kadang dijumpai kekhawatiran akan kekokohan bangunan tersebut, mengingat pada saat sekarang ini--meskipun terjadi pada daerah lain di luar wilayah Kota Banjarbaru--semakin kerap terjadinya kegagalan bangunan berupa kolaps/ambruknya bangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu perlunya pengawasan berkala secara detail oleh Konsultan Pengawas bersama-sama Bidang Cipta Karya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Peningkatan Jalan Lingkungan, sehingga potensi temuan kurangnya ketebalan LPA dan LPB oleh BPK dapat diminimalisir. Serta perlunya perencanaan teknis yang lebih berkualitas dan terperinci sehingga tantangan-tantangan teknis di lapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Bidang Cipta Karya pada tahun 2023 akan melaksanakan updating inventarisasi jalan lingkungan. Untuk memudahkan perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan, di tahun 2023 direncanakan akan disinergikan aplikasi jalan dan drainase lingkungan, agar kondsi eksisting kedua jenis infratruktur yang tersebar di Kota Banjarbaru ini dapat terpantau secara berkala.

Pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya akan mulai menginventarisasi bangunan-bangunan yang akan dicanangkan menjadi bangunan cagar budaya. Selain itu di tahun 2023 akan dibuat aplikasi informasi bangunan gedung negara yang berisi informasi mengenai teknis bangunan dan tahun pembangunannya, agar kedepannya dapat dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung negara yang lebih baik dan tetap mematuhi aturan bangunan yang berlaku serta kaidah estetika/arsitektural bertema tertentu.

7. Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.68 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Jumlah Layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	7 Layanan	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi yaitu :

1. Pembentukan tim teknis yang bertugas :
   a. Pengumpulan data dan informasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional
   b. Melakukan update data dan informasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional
   c. Melakukan pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi yaitu dikarenakan tidak bisa mengakses data dan informasi usaha jasa konstruksi melalui LPJK.net sehingga data yang didapatkan hanya bisa melalui proses manual (survey ke lapangan).

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu lebih mengoptimalkan survey kelapangan sehingga data yang didapatkan selalu terupdate secara berkala.

8. Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.69 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Paket	30 Paket	100 %
2.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 Unit	4 Unit	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Peralatan dan Uji Mutu yaitu pembagian tugas tim teknis untuk pengendalian kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu kurangnya koordinasi antar pemilik proyek , pelaksana dan tim uji mutu dalam pelaksanaan pengawasan uji mutu.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu meningkatkan koordinasi antar pemilik proyek, pelaksana dan tim uji mutu dalam pelaksanaan pengawasan uji mutu.

9. Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.70 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.	Tersusunnya dokumen teknis rencana Tata Ruang (RTR)	Jumlah dokumen teknis rencana tata ruang yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100 %

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan koordinasi secara maksimal dengan tim pendamping penyusunan dokumen rencana tata ruang.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu kurangnya personil yang menguasai pemetaan pada Bidang Tata Ruang.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan pelatihan atau bimtek yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang.

10. Sub. Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Capaian kinerja Eselon IV Sub. Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.71 Realisasi dan Capaian Indikator Sub. Koordinator Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesaikannya Perizinan Izin Penggunaannya Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100 %	100%	100%

A. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Sub. Koordinator Perencanaan dan Penataan Ruang yaitu menyesuaikan permohonan IPPT yang masuk untuk dapat dilakukan survey dan pelaksanaan rapat IPPT.

B. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu tidak pastinya permohonan IPPT yang masuk untuk bisa dilakukan survey dan rapat IPPT.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu mengupayakan bahwa layanan IPPT dapat berjalan lancar sesuai dengan permohonan yang masuk.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru adalah 4 (empat) sasaran berkategori *Melebihi Target* dan 7 (tujuh) sasaran berkategori *Sesuai Target*. Dengan demikian rata-rata capaian sasaran keseluruhan berkategori *Melebihi Target*.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 168.773.228.300 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 153.295.381.512 atau dengan serapan dana APBD-P mencapai 90,83%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjarbaru.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk pelaksanaan kinerja dinas pada tahun 2022, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang perlu SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelasanaannya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan, diantara lain :

1. Meningkatkan infrasruktur perlindungan banjir dengan tipe konstruksi yang lebih terjaga mutunya, mudah metode pelaksanaannya serta relatif cepat pelaksanaannya sehingga memaksimalkan umur konstruksi dan meminimalisasi terjadinya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Melakukan perkuatan/peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk lebih memaksimalkan kinerja jaringan irigasi dan meminimalisir biaya pemeliharaan.
3. Melaksanakan lebih banyak lagi jalan kota yang dibangun yaitu dengan membuka jalan-jalan penghubung yang belum terkoneksi dengan jalan-jalan kota sesuai Rencana Umum Jaringan Jalan dan melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan kota yang makin banyak bisa tertangani.
4. Melaksanakan perbaikan saluran-saluran drainase di Kota Banjarbaru yang dibangun dan dipelihara melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan lingkungan yang makin banyak agar bisa tertangani.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi agar lebih tertib terhadap tertib usaha, tertib penyelenggraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

7. Melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Banjarbaru dari tahun 2022 hingga tahun 2026 dimulai dengan penyusunan Peta Dasar dan Peta Tematik Skala 1:5.000 di tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk dapat menyempurnakan laporan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

LAMPIRAN

1. SOP Pengumpulan data kinerja

2. SK Pengelola SAKIP

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Mitra Praja No.9 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 5931688
Website : http://dispupr.banjarbarukota.go.id/ E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru tahun 2010-2020;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 69 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 tentang Pengesahan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Juni 2022

Kepala Dinas

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

Tembusan :
1. Walikota Banjarbaru
   Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Nomor : 89 Tahun 2022
Tanggal : 2 Juni 2022

1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

2. Tugas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Berkualitas	Persentase Saluran Drainase yang berfungsi baik.	Total Panjang Saluran Drainase yang berfungsi dengan baik dibagi Total Panjang Saluran Drainase dikali 100 %	Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan, Seksi Air Bersih & Penyehatan Lingkungan	Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
5.	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kota dalam kondisi baik.	Total Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap dibagi Total Panjang Jalan Lingkungan sesuai SK dikali 100 %	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Pembangunan Gedung	Bidang Cipta Karya
6.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik.	Jumlah Gedung Negara yang ditangani dibagi Jumlah Gedung Negara yang direncanakan ditangani dikali 100 %		
7.	Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi baik	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertata baik.	Jumlah Fasilitas Umum Yang Ditangani dibagi Jumlah Fasilitas Yang Direncanakan Ditangani dikali 100 %		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

TAHUN 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir.	Panjang Sungai yang ditangani dibagi Total Panjang sungai yang rencana akan ditangani dikali 100 %	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai & Waduk	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi.	Existing tahun sebelumnya (%) + (Rencana Luas Penanganan (Ha) dibagi Luas DI (Permen 14) (Ha)) dikali 100 %	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota.	Jumlah KK yang terlayani akses air bersih dibagi Total Jumlah KK dikali 100 %	Seksi Air bersih dan Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kota.	Jumlah KK yang terlayani tangki septik dan MCK dibagi Total jumlah KK dikali 100 %	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
8.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Jumlah Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap dibagi Jumlah Total Panjang Jalan Kota dikali 100%	Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan dan Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan	Bidang Bina Marga
9.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Layanan Informasi dan Pengawasan terhadap Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.	Jumlah Layanan SIPJAKI yang tersedia dibagi 7 layanan SIPJAKI dikali 100% Jumlah Paket Pekerjaan yang dilakukan Pengawasan dibagi Jumlah Target Paket Pekerjaan yang dilakukan Pengawasan dikali 100 %	Seksi Peralatan & Uji Mutu dan Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.	Bidang Pengembangan Konstruksi.
10.	Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten	Persentase Terselenggaranya Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah izin Penataan Ruang yang sesuai RTRW dibagi Jumlah izin Penataan Ruang yang diterbitkan dikali 100%	Seksi Perencanaan & Penataan Ruang dan Seksi Pemanfaatan, Pengendalian & Evaluasi Tata Ruang	Bidang Tata Ruang

Kepala Dinas,

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

Scanned with CamScanner

3. Foto Visual Kegiatan

FOTO KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR TA. 2022

Kegiatan Peningkatan Sungai Pulatan Segmen 2 (Paket 4)

Program	:	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	:	Pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Tanggul Sungai
Pekerjaan	:	Peningkatan Sungai Pulantan Segmen 2
Lokasi	:	Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang
No Kontrak	:	610/02/SP/PTS-04/DPU&PR/VI/2022
Tanggal Kontrak	:	8 Juni 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 2.482.165.000,00
Nilai Addendum 1	:	Rp. 2.504.730.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. RAKEDOV KONSTRUKSI INDONESIA
Konsultan Pengawas	:	CV. SEMBILAN DUA TEKNIK KONSULTAN

Pembuatan Bangunan Air DI. Peramuan Kel. Landasan Ulin Tengah

FOTO KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2022

1. PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JL. PONDOK YASIN KEL. GUNTUNG MANGGIS

Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) T.A 2022
Pekerjaan	:	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jl. Pondok Yasin Kel. Guntung Manggis (Paket.1) (DAK Reguler)
Lokasi	:	Jl. Pondok Yasin Kel. Guntung Manggis
No Kontrak	:	621/02/SP/REHAB.HAR.JL-1/DAK/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	:	19 Mei 2022
Nilai Kontrak	:	Rp 1.565.729.000,-
Waktu Pelaksanaan	:	150 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. WIRA KARYA PRATAMA

Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Rehabilitasi Jalan
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Jalan Gotong Royong 3 (Kel. Mentaos), Jalan Pondok Labu (Kel. Loktabat Utara), Jalan Bina Murni dan Jalan Pancasetia (Kel. Loktabat Utara) (Paket.2)
Lokasi	:	Kelurahan Mentaos dan Loktabat Utara
No Kontrak	:	621/02/SP/REHAB.JL-2/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	:	19 Mei 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 2.375.000.000,00
Nilai Adendum 1	:	Rp 2.396.590.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	150 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. GUNUNG WILIS

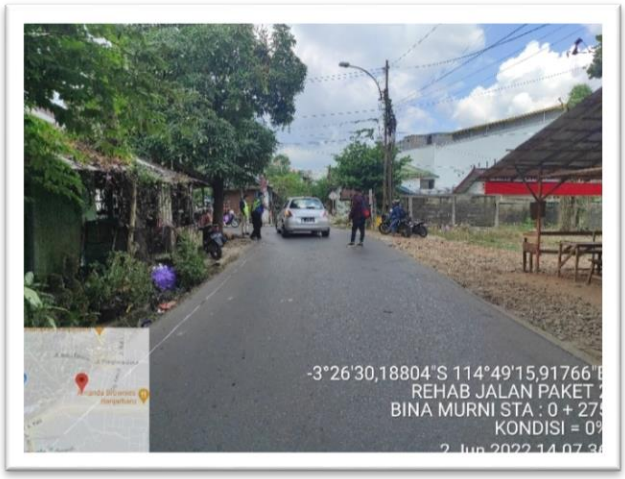

KEGIATAN PEKERJAAN 100%
STA : 0 + 27

KEGIATAN : GALIAN
STA = 0+27
REHAB JALAN BINA MURNI (Paket 2

KEGIATAN ASPALAN AC-WC 100%
STA : 0 + 200
RUAS JALAN PANCASETIA (PAKET 2

Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Pekerjaan	:	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bina Karya (Kel. Kemuning), dan Jl. Zam-zam Zailani (Kel. Kemuning) (Paket.1)
Lokasi	:	Kelurahan Kemuning
No Kontrak	:	621/02/SP/PENINGKATAN.SDP-1/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	:	31 Mei 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.427.437.000,00
Adendum	:	Rp. 1.440.413.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. PRIMA TEKNIK KONSTRUKSI

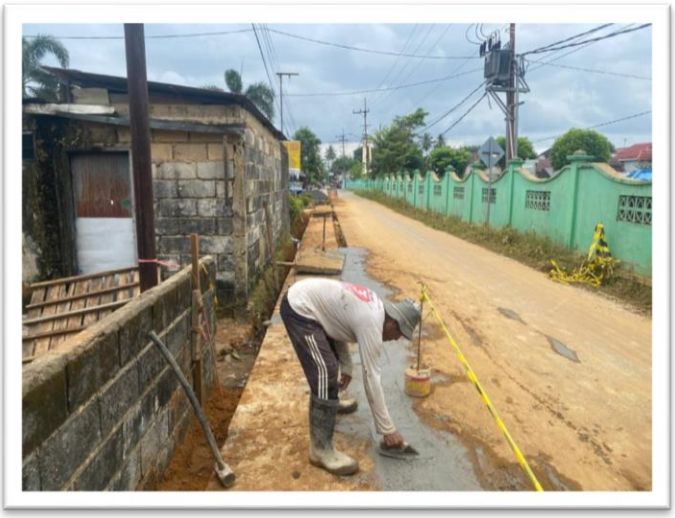

Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Pekerjaan	:	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A. Yani Km. Bjm 34+000 (Paket 2)
Lokasi	:	Kota Banjarbaru
No Kontrak	:	621/02/SP/REKON.JL-2(JPO)/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	:	1 Julu 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 4.798.669.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. TIGA JAYA GROUP

FOTO KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2022

Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Renovasi Fasad Gedung Balai Kota Pemerintah Kota Banjarbaru
Lokasi	:	Kota Banjarbaru
No Kontrak	:	641/03/SP/FASAD/P4GDK/CK/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	:	29 Agustus 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.874.778.000,00
Nilai Adendum 1	:	Rp. 2.010.134.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. BANGALI JAYA BAROKAH

Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Distribusi & Sambungan Rumah Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang (100 Sr)
Lokasi	:	Jalan Lingkar Utara
Pelaksana	:	CV. MITRA BONANZA

Program	:	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan	:	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan
Lokasi	:	Kota Banjarbaru
Tanggal Kontrak	:	29 Agustus 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 349.784.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	KSM SEKATA